

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan dan menganalisis temuan yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya mengenai strategi penanganan anak korban kekerasan seksual berdasarkan pada fokus penelitian menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) menurut Freddy Rangkuti (2008) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Strengths* (Kekuatan)

Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya yaitu dengan memaksimalkan kekuatannya yaitu kewenangan untuk melakukan penanganan pada anak korban kekerasan seksual, memaksimalkan anggaran yang dimiliki untuk memberikan layanan penanganan, serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia, demi kelancaran penanganan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dari kekuatan tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

2. *Weaknesses* (Kelemahan)

Kelemahan yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya adalah jumlah sumber daya manusia yang terbatas. Selain itu kelemahan yang dimiliki yaitu kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai, sehingga masih belum bisa menciptakan suasana aman, nyaman,

dan aman bagi anak korban kekerasan seksual pada saat pelaksanaan penanganan berlangsung. Selain itu pula, keterbatasan jumlah sumber daya manusia membuat penanganan anak yang menjadi korban kekerasan juga kurang maksimal karena seringkali rencana penanganan yang sudah direncanakan dibatalkan secara tiba-tiba karena tugas dinas.

3. *Opportunities* (peluang)

Peluang yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dalam penanganan anak korban kekerasan seksual adalah adanya peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai payung hukum pada proses pelaksanaan penanganan, selain itu adanya dukungan pihak swasta juga menjadi peluang karena dapat mengukur tingkat partisipasi dan kepedulian pihak swasta terhadap kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang anak. Peluang yang terakhir yang dimiliki adalah adanya PPTP2A yang menjadi tanggung jawab penuh oleh Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya adalah adanya PPTP2A di bawah bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak. Adanya PPTP2A menjadi peluang karena sebagai lembaga pendukung untuk pencegahan dan penanganan pada anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan.

4. *Threats* (Ancaman)

Ancaman yang ada dalam penanganan anak korban kekerasan seksual oleh Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Surabaya adalah mentalitas masyarakat yang masih kurang peduli terhadap dan masih awam terhadap kasus kekerasan seksual, karena pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan oleh keluarga dan kerabat korban itu sendiri. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang kurang terjalin dengan baik, sehingga berdampak pada penanganan anak korban kekerasan seksual yang kurang maksimal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya sudah dilaksanakan, namun masih belum cukup maksimal. Hal tersebut dikarenakan DP5A memiliki kekuatan dalam bentuk sarana dan prasarana, namun juga bisa menjadi sebuah kelemahan karena kondisi prasarana yang digunakan dalam melakukan penanganan belum memadai. Sarana yang disediakan oleh DP5A masih belum mampu untuk membangun rasa aman, nyaman, dan rahasia, sehingga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan sang korban dengan pelaksana penanganan.

Selain itu, DP5A tergabung dalam jejaring tim penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan menjadi peluang besar, namun hal serupa dapat menjadi ancaman karena koordinasi antar lembaga masih belum terjalin dengan baik, berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program penanganan yang dilakukan. Ancaman lain yang cukup sulit bagi Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya adalah

mentalitas masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual itu sendiri. Sehingga akan berpengaruh pada proses penanganan, dan juga keberhasilan dari penanganannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka adapun saran yang diberikan dalam penanganan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi kelemahan yang ada, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya harus memiliki sumber daya manusia atau aparatur yang berkompeten dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga pada proses penanganan, akan ditangani oleh orang yang ahli dan profesional, serta mencukupi.
2. Dalam memanfaatkan peluang yang dimiliki, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani korban kekerasan seksual, sehingga masyarakat akan semakin peduli terhadap permasalahan kekerasan seksual. selain itu, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya diharapkan dapat bekerjasama dengan lembaga

masyarakat yang peduli dengan kasus kekerasan seksual, sehingga semakin banyak masyarakat yang sadar akan bahaya dari kasus kekerasan seksual.

3. Untuk menghadapi ancaman yang dimiliki, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual, bagaimana cara mengatasi kasus kekerasan seksual dan menghindari kasus kekerasan seksual, sehingga jumlah kasus tersebut dapat ditekan. Selain itu Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya harus melakukan dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program penanganan, agar pada saat proses pemberian layanan sesuai dengan tujuan dan mencapai keberhasilan